

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara akan berkembang maju dan beradab salah satunya ditentukan oleh majunya pendidikan di negara tersebut. Indonesia, sebagai negara yang besar sedang berjuang untuk memajukan pendidikan demi kesejahteraan warganya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini berarti pendidikan nasional mengemban tugas mengembangkan manusia Indonesia menjadi manusia yang utuh dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang berkarakter. Pendidikan diselenggarakan bukan hanya untuk membangun kecerdasan dan *transfer of knowledge*, tetapi juga harus mampu membangun karakter atau *character building*, sikap dan perilaku. Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan di keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan wahana untuk menyiapkan peserta didik yang berkarakter agar dapat bertahan pada era global.

Pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa “pemeliharaan” akan tetapi juga dengan maksud “memajukan” serta “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan (Dewantara, 2011). Ki Hadjar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah “penguasaan diri” sebab dengan pendidikan akan membentuk watak manusiawi atau menjadikan manusia/peserta didik semakin beradab dan memiliki keadaban (humanisasi). Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk mencapai pendidikan yang

memanusiakan manusia. Setiap peserta didik yang mampu menguasai dirinya, maka akan mampu menentukan dan menumbuhkan sikap kemandiriannya. Sikap mandiri menjadi salah satu tujuan akhir dari adanya proses pendidikan. Kedewasaan menjadi arah atau kendali bagi peserta didik dalam olah pikir, olah rasa, dan olah hati.

Pendidikan juga merupakan sarana untuk memperbaharui diri. Tanpa pendidikan, akan terperangkap hidup pada masa lalu yang menjadi salah satu penghalang bagi manusia untuk memperbaharui diri. Jika hingga saat ini pendidikan hanya dimengerti sebagai pengajaran sebagaimana telah terjadi selama ini, maka perubahan akan sulit terjadi. Akibatnya akan selalu menjadi produk masa lalu yang tidak beruntung. Pendidikan mampu menciptakan perubahan-perubahan dalam diri peserta didik maupun masyarakat yang lebih luas bahkan sampai dunia.

Pada hakikatnya, tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan landasan filosofi pendidikan yang mampu menyiapkan generasi masa depan untuk dapat bertahan hidup (*survive*) dan berhasil menghadapi tantangan di era global.

Pendidikan merupakan proses mengembangkan potensi cipta, rasa dan karsa peserta didik menuju kehalusan budi, kesehatan jasmani dan ketrampilan membina kehidupan dan penghidupan menuju insan berbudaya dan beradab. Landasan itu tercermin dari pandangan Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang tokoh pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai bagian kebudayaan hendaknya memahami sifat, bentuk, isi dan irama. Sifat merupakan ciri khas yang harus ada dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, bentuk merupakan cara mengorganisasi, Isi merupakan corak budaya yang hidup pada suatu masyarakat dan bisa berganti-ganti isinya sesuai keadaan dan jaman, sedangkan irama harus dipahami sebagai cara menggunakan unsur-unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab setiap orang (Dewantara, 1977). Pandangan Ki Hadjar Dewantara tersebut, menandakan bahwa kemampuan peserta didik pada aspek cipta, rasa dan karsa merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membentuk sosok pribadi yang utuh.

Dalam dunia akademis, khususnya ilmu pendidikan, baik global maupun di Indonesia, kemunculan era reformasi yang ditandai dengan desentralisasi dan otonomi memberikan orientasi pedagogis pada tren multikulturalisme (Tilaar,

2012). Orientasi pendidikan Indonesia diarahkan pada semboyan bangsa “Bhineka Tunggal Ika”, artinya cetak biru pendidikan Indonesia mesti berlandaskan filosofis dan kultural yang menjamin bahwa manusia Indonesia bermartabat dan berdaulat yang tidak tercerabut dari akar budaya sebagai bangsa Indonesia (Supriatna, 2016, hlm. 470). Cetak biru pendidikan Indonesia penting dirumuskan mengingat sejak pertengahan hingga akhir abad ke-20, pedagogis di Indonesia tidak jelas arah eksistensinya. Dari masa sebelum kolonial, pada masa kolonial, masa gerakan kebangsaan, masa proklamasi, hingga saat ini, landasan teoretis ilmu pendidikan di Indonesia tidak pernah dipersoalkan. Tilaar (2012, dalam Supriatna, 2016, hlm. 469) menafsirkan kondisi pedagogis ini sebagai “*business as usual*”.

Pada sistem pendidikan nasional kita terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan pada sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektifitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah, inferioritas sumber daya pendidikan, dan terakhir lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Akibatnya, harapan akan sistem pendidikan yang baik masih jauh dari sukses. Keadaan tersebut membutuhkan reformulasi yang secara sistemik memperhatikan berbagai faktor yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia (Munirah, 2015, hlm. 233-235).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama *Results Internasional* menyebut ada tiga permasalahan utama pendidikan di Indonesia yaitu kualitas guru, sekolah yang tidak ramah anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal. Kualitas guru yang rendah disebabkan rasio ketersediaan guru. lingkungan sekolah di Indonesia belum ramah anak. Hal tersebut terlihat dari masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun bukan fisik. Setidaknya ada enam tipe kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah, yakni penganiayaan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, sesama siswa wali murid kepada guru, pelecehan seksual dan tawuran antar sekolah. Akses pendidikan bagi kelompok marginal masih rendah. Kelompok marginal yang masuk kategori ini adalah perempuan, anak di penjara, kelompok difabel, anak keluarga miskin, dan para pengungsi (Republika.co.id, 2017).

Penetrasi kebudayaan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin masif dan disruptif dikhawatirkan menimbulkan terjadinya penyelenggaraan pendidikan disadari atau tidak disadari dilandasi oleh filsafat pendidikan yang berakar pada budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan filsafat dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai karena generasi muda kita dapat tercerabut dari akar budayanya, sehingga kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia (Syarifudin, 2015). Sebagai contoh : demam K Pop, Drama Korea, konten kreator, perilaku swafoto setiap saat, kecanduan *game online*, judi online dan sebagainya jika tidak disikapi secara bijak dikhawatirkan mempengaruhi karakter dan nilai-nilai budaya yang dianut bangsa Indonesia. Hal ini dirasakan perlu adanya kebutuhan yang sangat urgen secara nasional mengenai keharusan menemukan dan mengembangkan sendiri konsep ilmu pendidikan dan filsafat pendidikan yang kondusif untuk bangsa Indonesia...(Waini; Natawijaya, 2008; Syarifudin, 2015, hlm.3).

Fenomena yang berkaitan dengan anak didik dikuatkan dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan bahwa selama bulan Januari sampai 31 Maret tahun 2023, telah mendapat aduan kekerasan pada anak di ranah pendidikan sebanyak 64 aduan. Bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, bullying, kekerasan seksual, korban diskriminasi kebijakan satuan pendidikan, hingga kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperhatikan prinsip hak partisipasi anak (Kompas, 2023). Hasil kajian lain yang dilakukan Wibowo, Simaremare, dan Yus (2022, hlm. 37), menunjukkan bahwa permasalahan anak didik yaitu faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga. Keluarga yang baik akan melahirkan anak didik yang memiliki karakter serta motivasi belajar yang tinggi. Lingkungan sekolah memiliki peran utama. Guru sebagai penentu tercapainya keberhasilan siswa.

Manusia merdeka yaitu manusia yang secara hidup lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain tetapi bersandar atas kekuatan sendiri yang dimilikinya sendiri. Konsep *tut wuri handayani* pada dasarnya anak didik diberi kebebasan atau kemerdekaan dalam bertindak, berperilaku, belajar mandiri, mencari sendiri, mendorong kreatifitas, berekspresi, dan ide-idenya yang pelaksanaannya harus memahami dan memperhatikan norma-norma atau aturan.

Anak didik memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk bertindak, berperilaku namun demikian dengan kebebasan yang dimiliki tetap memiliki norma aturan kebebasan diri sendiri akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sehingga anak didik perlu menyadari ketika dalam mengembangkan kebebasan itu melanggar atau bertentangan dengan kebebasan orang lain harus dicegah istilahnya handayani.

Kasus perundungan yang terjadi, ketika kebebasan dimaknai tanpa ada ikatan yang jelas, aturan yang jelas, kesepakatan yang jelas sehingga perilaku anak didik relatif kurang terpantau. Handayani justru berperan ketika ada gejala menyimpang, handayani dapat berbentuk intervensi, bimbingan, konseling, hukuman yang mendidik dan muaranya penyadaran bahwa ketika anak didik berbuat yang menyimpang, merugikan orang lain, melanggar aturan maka anak didik harus kembali ke jalan yang seharusnya.

Pendidik atau pamong mendorong anak didik kreatif, inovatif dan mandiri dalam kegiatan pendidikannya selama masih dalam koridor, ketika ada gejala menyimpang, melanggar dalam suatu tindakan maka peran pamong/guru bimbingan dan konseling meluruskan kembali, atau memberikan intervensi atau handayani dalam bentuk bimbingan, konseling, nasehat, dorongan, memberi kekuatan, agar yang tidak terjadi perilaku yang menyimpang.

Peran pamong/guru mengawasi dan menjadi fasilitator sehingga peristiwa adanya perundungan dapat dicegah, yang dalam kacamata guru perlu memberi penegasan sebuah aturan ketika anak didik berbuat yang tidak merugikan orang lain, sehingga kemerdekaan yang dimiliki bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya tetapi kemerdekaan yang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir yaitu jangan selalu dipelopori disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri (Dewantara, 1997).

Berkaitan dengan pendidik (guru), saat ini belum semua pendidik memahami tentang adanya perubahan di era 4.0. Hal ini dapat dilihat dari konsep tentang industri 4.0. yang masih banyak belum dimengerti oleh pendidik. pendidik belum menyadari bahwa apa yang dilakukan sekarang apakah bermanfaat bagi

peserta didik setelah dewasa, apakah pendidikan yang diberikan mampu membantu dalam mengembangkan diri kearah kepribadian yang utuh. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru tanggal 12-20 Mei 2018 di tiga lokasi yaitu Sekolah Menengah Pertama di wilayah, Yogyakarta, Banyumas dan Bandung menemukan bahwa ; a) secara teoretis pemahaman guru tentang makna pendidikan, pendidik, karakteristik, dan nilai profesi pendidik masih lemah, b). pemahaman pedagogik praktis guru dalam pembelajaran masih cenderung stagnan dan monoton, penerapan pembelajaran inovatif dan kreatif masih kurang, peran guru masih lebih dominan sebagai informator (transfer ilmu), fasilitator, pengelola kelas dan organisator, c) model komunikasi interkatif dan penguatan perilaku dalam pembelajaran yang masih minim, d) pemahaman tentang peserta didik sebagai lebih cenderung berorientasi klasikal dibanding orientasi individual, e). aspek perkembangan kognitif atau pengetahuan (cipta) lebih dominan dibanding aspek emosi, sosial, moral, dan psikomotor dalam membentuk dan mengembangkan potensi siswa, f) penerapan guru sebagai *role model* dan penerapan sistem among dalam pendidikan belum kuat dilihat dari cara komunikasi dan pengelolaan pembelajaran dikelas. Konsep sistem among yang diterapkan belum mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan suasana pendidikan masih cenderung monoton dan membosankan.

Permasalahan yang berasal dari guru dapat dikemukakan sebagai berikut : Problematika guru terdiri dari problem internal, meliputi: (a) kompetensi pedagogis, yaitu lemahnya menguasai kelas, miskin inovasi dan kreativitas, minat baca rendah, kurang menguasai teknik penilaian yang baik dan guru kurang bahkan tidak menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi; (b) kompetensi profesional, yaitu kurang menguasai materi; (c) kompetensi kepribadian, yaitu sikap kurang mencintai pada profesi. Sedangkan problem eksternal, meliputi: besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas dan sumber belajar yang terbatas, disiplin dan perpustakaan yang tersedia (Wibowo, 2015). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Baharuddin dan Maunah (2022, hlm. 62-63), yang mengatakan bahwa problem yang dialami guru dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 2 yaitu problem internal yang berasal dari dalam diri guru dan problem eksternal yang berasal dari luar pribadi guru. Problem internal meliputi

kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan/materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya (kompetensi kepribadian) dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, serta menilai hasil belajar siswa (kompetensi pedagogik). Sedangkan problem eksternal meliputi problematika guru dalam pengelolaan kelas, problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa, problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran dan problematika guru dalam media pembelajaran.

Problem pendidik di Indonesia, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, mencakup problem internal dan eksternal. Problem internal terletak pada diri pendidik itu sendiri karena sering dijumpai pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai guru atau dosen, sehingga dalam praktik mengajarnya menjadi kurang menarik dan tidak inspiratif bagi anak didiknya. Kedua, problem eksternal. Dalam hal ini pemerintah sebagai *decision maker* harus berbenah dan mengevaluasi sisi-sisi pendidikan yang kurang (Rohman, 2016, hlm. 68).

Permasalahan lain yang dihadapi guru yaitu keterbatasan guru dalam mengontrol dan menilai siswa dalam proses pembelajaran daring, kemudian keterbatasan guru dalam memberikan materi yang mudah dipahami oleh siswa (Jamila, Ahdar, Natsir, 2021, hlm. 101). Pendapat Jamila dan kawan-kawan dipertegas dapat pandangan Suryana, dkk (2022, hlm. 77), yaitu bahwa permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh guru di sistem pendidikan terutama dalam keprofesionalan seorang pendidik dalam mendidik seorang murid masih kurang masif di tiap sekolah. Selain itu keprofesionalan seorang guru dalam keahliannya menjadi sebuah kunci untuk meningkatkan mutu anak didik untuk lebih cepat tanggap dan efektif.

Hal ini memberikan gambaran bahwa guru perlu memahami dan memiliki landasan orientasi nilai filosofis dibandingkan mempertahankan netralitas (hampa orientasi) dalam hal menghadapi kebutuhan-kebutuhan peserta didik secara optimal yang dimiliki masing-masing individual (Williamson, 1958, hlm. 529; Hidayat, 2015). Berbagai permasalahan tersebut guru mempunyai peran yang penting untuk turut mengatasinya. Salah satunya melalui memberikan pengaruh selama proses pendidikan.

Aliran filsafat pendidikan yang dianut seseorang menjadi titik tolak dan pemberi arah dalam rangka studi dan praktik pendidikan yang diselenggarakannya. Perlu dipahami bahwa setiap aliran filsafat pendidikan lahir dalam konteks sosial-kultural pada zamannya. Terjadinya kekeliruan dalam mengadopsi aliran atau konsep filsafat pendidikan akan mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan. Kesalahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat berupa kesalahan konseptual maupun kesalahan teknis pendidikan. Munculnya permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan secara mendasar akan bersumber dari filsafat pendidikan yang dianut dan dipraktikkan oleh para pendidik.

Setiap bangsa memiliki filsafat pendidikannya sendiri yang sesuai dengan konteks sosial-kultural dan zamannya. Jika suatu bangsa tidak memiliki filsafat pendidikan sendiri akan terombang-ambing dalam menyelenggarakan sistem pendidikannya. Landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif; artinya mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut.

Mochtar Buchori berpendapat bahwa pedagogik sebagai ilmu pendidikan di Indonesia berhadapan dengan problem ontologik. Problem yang dimaksud berhubungan dengan objek kajian atau bidang telaahan yang tidak berkembang secara fundasional dan struktural. Problem pendidikan di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga kategori bidang permasalahan yang mencakup : (1) permasalahan fundasional (filosofis, teoretis, politis, ekonomis, dan sebagainya); (2) permasalahan struktur (jalur, jenjang, jenis struktural kelembagaan, organisasional dan manajerial, dan sebagainya); (3) permasalahan operasional (kurikulum, sistem pembelajaran, pembimbingan, penilaian, dan sebagainya) (Supriatna, 2016, hlm. 485-489).

Tinjauan di atas sejalan dengan persepsi Muchtar Buchori, yakni bahwa selama ini sebagian besar upaya telaah atau kajian bidang pendidikan baru tercurah atau terfokus pada area masalah operasional pendidikan di lingkungan persekolahan, sementara kajian ranah struktural, apalagi area fondasional luput mendapat perhatian lebih (Supriatna, 2014, hlm. 371). Permasalahan fundasional meliputi persoalan filosofis, teoretis, politis, ekonomis, dan sebagainya penting

mendapat perhatian sebagai objek kajian sehingga orientasi pedagogis bangsa ini menjadi jelas.

Oleh karena itu, penelitian fondasional menjadi penting untuk dikembangkan sebagai salah satu kontribusi bagi pendidikan khususnya yang bersifat fondasional. Pada penelitian ini berupaya memberi rumusan landasan filosofis bagi pengembangan pendidikan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Landasan filosofis bimbingan dan konseling dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya digali dengan bersumber dari khazanah budaya bangsa berupa naskah tulisan tangan atau manuskrip kuno (Hidayat, 2019).

Hasil kajian terhadap tren penelitian sepuluh tahun terakhir khususnya disertasi di Universitas Pendidikan Indonesia sebagian besar (95%) pada permasalahan operasional dan struktural yang meliputi : kurikulum, model, sistem pembelajaran, pembimbingan, penilaian, jalur, jenjang, jenis struktural kelembagaan, organisasional dan manajerial.

Begitu juga dengan tren penelitian fondasional bimbingan dan konseling secara tekstual referensi banyak digali dari filsafat barat, filsafat timur, sufi, agama, meliputi : Yusuf (2007) tentang Perseptual Konseling Islami, Kartini (2010) tentang Konseling Karir Efficacy, Hafid (2010) tentang Konseling Kognitif Perilaku, Solokin (2011) tentang Bimbingan Spiritual Berbasis Nilai-nilai Budaya pada Komunitas Suku Dayak Hindhu Budhai Bumi Segandu Indramayu, Arifin (2013) tentang Bimbingan dan konseling Islami pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit, Fuad (2013) tentang Halaqah untuk mengembangkan Kepribadian Muslim, Ridwan (2014) tentang Bimbingan Berlandaskan Neo-Sufisme untuk Mengembangkan perilaku Arif, Mashar (2015) tentang Konseling Metafora untuk meningkatkan Tanggungjawab Siswa, Hanim (2016) tentang Konseling Kelompok Adlerian dalam Pengembangan Karakter Siswa, Netrawati (2016), tentang Konseling Analisis Transaksional untuk Mengurangi Perilaku Agresif Remaja, Hasim (2017) Bimbingan Kelompok Berlandaskan Nilai-Nilai Falsafah Panca Jiwa Pondok untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial, Hidayat (2019) tentang Landasan Filsafiah Bimbingan dan konseling Berdasarkan Telaah Hermeneutika Fenomenologis terhadap Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian.

Pada penelitian fondasional di atas masih sangat sedikit referensi penelitian fondasional yang berangkat dari pemikiran anak bangsa, seperti nilai-nilai budaya lokal, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara landasan filosofis bimbingan dan konseling yang seharusnya dianut dengan kenyataan berdasarkan hasil penelitian bimbingan dan konseling yang berakar dari konteks kearifan lokal. Salah satu konteks ini yaitu nilai kearifan lokal yang perlu digali adalah pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang *tut wuri handayani*.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak melupakan akar budaya dan kearifan budaya setempat. Pendidikan dapat tumbuh dan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kepekaan terhadap lingkungan atau kondisi sosial budaya (Sumaatmadja, 2004; Harish, 2011, hlm. 15). Sesuai dengan yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara, bahwa untuk mendapatkan sistem pengajaran yang akan berfaedah bagi perikehidupan bersama, haruslah sistem itu disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat (Dewantara, 1977, hlm. 3).

Filsafat pendidikan dikelompokkan menjadi delapan yaitu : idealisme, realisme, eksperimentalisme atau pragmatisme, scholastisme atau humanisme rasional-religius atau rasionalisme, eksistensialisme, komunisme, filsafat analitik dan konstruktivisme. Terdapat empat teori pendidikan yang mengacu kepada aliran-aliran filsafat tertentu, yaitu : perenialisme, progresivisme, esensialisme, dan rekonstruktivisme (Syarifudin, 2015, hlm. 35). Begitu juga dengan bimbingan dan konseling di Indonesia cenderung mengikuti tren filsafat asing baik dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Disamping itu juga terdapat permasalahan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan teori, metode, program dan teknik bimbingan dan konseling di Indonesia.

Upaya bimbingan dan konseling dalam merealisasikan fungsi pendidikan akan terarah kepada upaya membantu individu, dengan kemotekaran nalarnya, untuk memperhalus (*refine*), menginternalisasi, memperbaharui, mengintegrasikan sistem nilai yang diwujudkan secara kongruen ke dalam pola perilaku yang mandiri (Kartadinata, 2011, hlm. 25). Dalam upaya memanusiakan manusia layanan bimbingan dan konseling di Indonesia dibangun dengan landasan filosofis, landasan pedagogis, dan landasan budayanya bersifat multi etnis, multi religius dan

multi kultur yang kaya akan pendidikan nilai berbasis kearifan lokal. Peneropongan filosofis menghasilkan asumsi-asumsi dasar tentang hakikat dan tujuan hidup manusia, tentang sifat-sifat dan potensi manusia untuk berkembang dan menerima pengaruh dari luar dan nilai-nilai serta norma yang digunakan dalam mengarahkan perkembangan itu. Pendekatan filosofis bukan hanya mempertanyakan tentang hakikat dan tujuan hidup manusia (*human nature and destiny*) tetapi juga tentang kemungkinan pendidikan dalam arti kemampuan manusia berkembang dan menerima pengaruh dari luar terutama secara etis sehingga pertumbuhan dan perkembangan dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, berdasarkan potensi dan sifat-sifat bawaan seorang peserta didik sebagai makhluk sosial dan sebagai individu (Basuki, 2013).

Bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang sangat berguna dalam pendidikan, terutama untuk membentuk manusia secara logis sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pandangan filosofis tentang bimbingan dan konseling adalah pandangan terjadi dalam proses dialektikal terapeutik dalam proses konseling. Demikian juga bimbingan dan konseling sarat dengan proses filosofis (Alfaiz, 2018, hlm. 41-47). Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang: apakah manusia itu? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat post-modern (Lahmuddin, 2012, hlm. 57-82).

Produk kebudayaan lokal yang memiliki latar belakang spiritual (nilai-nilai religi/agama), filosofis (fakta mental dan pikiran), historis (fakta sejarah), dan sosiologis (nilai-nilai sosial) yang memiliki fungsi penting bagi pengembangan peradaban manusia (Tragono, 2012) yang pada mulanya lengket tidak dapat terpisahkan. Namun, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola tingkah laku dan kehidupan manusia yang tidak pernah berhenti, maka kebudayaan akan senantiasa menampilkan sosok yang dinamis mengilhami dan mewarnai corak kehidupan baru.

Sosok yang dinamis sebagai produk dari suatu realitas kehidupan pada suatu kelompok masyarakat, selain senantiasa tetap mencerminkan sosok dasar pewaris

budaya tertentu, tidak akan pernah menolak hadirnya budaya lain yang datang kemudian. Di sinilah terjadinya akulturasi budaya, yang kemudian memunculkan budaya baru sebagai hasil produk pola kehidupan bersama.

Pada hakikatnya pendidikan mengembangkan semua potensi sumber daya manusia menuju kedewasaan sehingga mampu hidup mandiri dan mampu pula mengembangkan tata kehidupan bersama yang lebih baik sesuai dengan tantangan atau kebutuhan zamannya, dengan kata lain pendidikan adalah mengembangkan “*human dignity*” yaitu hakikat dan martabat manusia atau *humanizing human*, yaitu memanusiakan manusia (Mastuhu, 2004). Peran penting di sekolah dalam upaya memanusiakan manusia adalah hadirnya sosok seorang guru bimbingan dan konseling/konselor. Di dalam upaya membantu manusia mencapai pribadi yang utuh, bimbingan dan konseling peduli terhadap pengembangan kemampuan nalar yang motekar (kreatif) untuk bisa hidup baik dan benar.

Ki Hadjar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan, politikus, jurnalis, budayawan dan seniman, serta pejuang kemerdekaan Indonesia, banyak mempengaruhi pendidikan di Indonesia melalui pemikiran-pemikirannya yang melandasi proses dan teori pendidikan. Pemikiran tersebut digali dari kearifan budaya dan kearifan lokal sejarah bangsa Indonesia yang dipadukan dengan reformasi pendidikan dunia pada awal abad 19.

Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara identik dengan sama dengan tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire yaitu *humanisasi* (Syarifudin, 2015) dalam pengertian “dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan”. Humanisasi menurut Ki Hadjar Dewantara (Hasbullah, 2000; Kesuma dan Ibrahim, 2016, hlm. 127) yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat dimaknai sebagai sifat bawaan manusia yang menurut Ki Hadjar Dewantara (Syarifudin, 2015, hlm. 26) manusia dilahirkan dengan kekuatan kodrati yang lengkap tetapi belum semuanya sempurna, adapun kekuatan kodrati tersebut yaitu : akal budi, rasa iman, insting, nafsu (memiliki potensi untuk berbuat baik dan jahat). Menurut Ki Hadjar Dewantara (1997, hlm. 93-94), maksud luhur dari pendidikan yaitu tertuju pada fungsionalitas dari jiwa yang

termanifestasi pada akal, hati dan kehendak. Ki Hadjar Dewantara menambahkan untuk mengetahui kodrat alam, orang perlu memiliki budi yang bersih (*wijsheid*) dan termanifestasi pada angan-angan yang tajam, halusnya rasa dan sucinya kemauan yaitu kesempurnaannya cipta-rasa-karsa dan ketiganya harus sakti, yang kemudian disebut *tri sakti jiwa*. Akal dapat menjadi sakti jika mampu mencipta, hati dapat menjadi sakti jika mampu merasa, dan kehendak dapat menjadi sakti jika mampu mengkarsa.

Salah satu pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan yang mampu membentuk manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka yang dimaksud bukan hanya merdeka dari penjajahan seperti terjadi pada saat bangsa Indonesia mengalami penjajahan sampai tahun 1945 tetapi lebih luas lagi membentuk manusia yang merdeka pikirannya merdeka jiwanya dan merdeka badannya. Jiwa merdeka identik dengan jiwa mandiri. Upaya untuk membentuk manusia yang berjiwa merdeka atau mandiri tersebut, pendidikan mendorong manusia mengembangkan potensinya dengan peran serta pendidik atau pamong dalam mencapai manusia yang salam dan bahagia. Pendidikan yang memberikan kebebasan setiap manusia untuk mengembangkan segenap potensi yang berlandaskan pada kodrat alam dan kemerdekaan dalam setiap kehidupan dengan pengaruh pendidik atau pamong ketika manusia mendekati atau mulai gejala menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku yang dikenal dengan tut wuri handayani.

Manusia yang berjiwa merdeka dengan tut wuri handayani sebagai landasan dan pedoman dalam teori dan pelaksanaan (praksis) memberi arah terhadap landasan filsafat pendidikan di Indonesia.

Landasan filsafiah bimbingan perkembangan diarahkan pada pencapaian perkembangan pribadi yang adekuat dan efektif melalui pemahaman diri dan lingkungan, pemahaman tentang hubungan antara diri dan lingkungan, dan pemahaman nilai-nilai pribadi dan sosial. Bimbingan merupakan proses layanan yang komprehensif yang berlangsung di lingkungan sekolah, maupun luar sekolah (masyarakat), dan melibatkan semua pihak : personil sekolah (kepala sekolah, guru dan konselor), para siswa, orangtua dan masyarakat pada umumnya (Yusuf, 2009, hlm. 54).

Landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif; artinya mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut.

Landasan bimbingan dan konseling merupakan masalah yang esensi sebagai pondasi layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan yang kokoh akan mempengaruhi struktur bangunan di atasnya dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya pengembangan potensi-potensi positif individu. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling agar potensi-potensi positif yang mereka miliki berkembang optimal. Pengembangan potensi-potensi positif memungkinkan individu mencapai aktualisasi diri. Meskipun demikian, paradigma bimbingan dan konseling ini tidak mengabaikan layanan-layanan yang berorientasi pada pencegahan (preventif) dan pengatasan masalah (kuratif).

Upaya mewujudkan potensi peserta didik/konseli menjadi kompetensi dan prestasi hidup memerlukan sistem layanan pendidikan integratif. Kompetensi hidup dikembangkan secara isi mengisi atau komplementer antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran dalam satuan pendidikan.

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan membutuhkan landasan filosofis yang kuat bersumberkan abstraksi nilai-nilai lingkungan, nilai karakter dan kearifan lokal budaya setempat. Landasan filosofis memberikan orientasi pengembangan keilmuan bagi bimbingan dan konseling sebagai kompetensi umum, kode etik, dan praktik layanan. Pendidikan sebagai proses kebudayaan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan kognitif, tetapi juga pengembangan kemampuan afektif dan konatif (psikomotor). Pengembangan kemampuan kognitif melalui olah pikir, pengembangan kemampuan afektif melalui olah rasa, kemampuan konatif melalui olah karsa dan kemampuan psikomotor melalui olah raga (Latif, 2020, hlm. 146-158).

Bimbingan dan konseling sebagai komponen yang terpadu dalam sistem pendidikan, berfungsi memfasilitasi manusia untuk mencapai kemandirian yang diwujudkan dalam kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, dan merealisasikannya secara

bertanggung jawab sehingga tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Fasilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperlancar proses, karena secara kodrati setiap manusia berpotensi untuk berkembang. Perkembangan peserta didik/konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup warga masyarakat, termasuk peserta didik/konseli.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak dapat lepas dari nilai, landasan dan budaya Indonesia. Landasan filosofis bimbingan dan konseling yang bersumber pada nilai budaya setempat akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan keberhasilan proses pendidikan (Nurihsan, 2005). Salah satu azas dan landasan bimbingan dan konseling di Indonesia adalah Tut Wuri Handayani. Tut wuri handayani yaitu suatu asas dan landasan pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik/konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal.

Sementara ini implementasi pelaksanaan bimbingan dan konseling masih banyak menerapkan teori yang berasal dari barat. Sedangkan barat berbeda dari berbagai sisi budaya (sekuler). Bangsa Indonesia banyak memiliki kearifan local (*local wisdom*) dan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan baik apabila bimbingan dan konseling mengakar pada kearifan lokal.

Tut wuri handayani merupakan salah satu kearifan lokal yang menasional dan diakui merupakan memberikan kontribusi bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara diakui menjadi simbol dari kementerian pendidikan. Tut wuri handayani merupakan modal yang penting dalam sistem pendidikan nasional yang belum tergali secara mendalam.

Pelaksanaan kearifan lokal dalam masyarakat mempunyai nilai-nilai pedagogis di dalam pembentukan pribadi atau watak calon anggota masyarakat

(Tilaar, 2015, hlm. 25). Individu dapat mempertahankan identitasnya dengan realitas yang datang bertubi-tubi seperti modernisasi serta gelombang globalisasi telah dikenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara melalui prinsip Trikon (Kontinuitas suatu kebudayaan, konsep mengenai konvergensi, konsep mengenai konsentris dari perkembangan suatu kebudayaan). Prinsip Trikon dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai prinsip-prinsip yang perlu dimiliki individu dalam perkembangannya menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan yang berubah secara cepat dalam era globalisasi (Tilaar, 2015, hlm. 41).

Rintisan pendidikan nasional sesungguhnya sudah dimulai sejak jaman penjajahan belanda, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara dengan mendirikan Perguruan Tamansiswa. Sesuai dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan adalah “daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya” (Tim LKM UNJ, 2011, hlm. 78). Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tersebut dituangkan dalam tujuan pendidikan di perguruan Tamansiswa ialah membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya (Rahardjo, 2009, hlm. 63).

Ki Hadjar Dewantara sebagai salah seorang pelopor pendidikan nasional Indonesia yang berfikir dan menyelenggarakan praktik pendidikan dengan berdasarkan kepada kebudayaan nasional. Ki Hadjar Dewantara menyebut sistem fikiran dan praktik pendidikannya sebagai “*aliran kultural—nasional*” (Dewantara, 1997, hlm. 131; Pramudya, 2006; Hamdani, 2013; Syarifudin, 2015). Ki Hadjar Dewantara melalui praktik pendidikan yang didasarkan pada pemikirannya tersebut telah turut berjasa mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Tetapi sangat disayangkan sistem pendidikan tersebut dewasa ini sangat kurang diminati untuk dikaji dan terpinggirkan dalam praksis. Ki Hadjar Dewantara adalah humanis dan pendidik sejati, namun patut disayangkan bahwa idealisme pendidikannya (konsep,

semboyan dan metode) dewasa ini semakin terpinggirkan oleh praksis pendidikan di Indonesia (Samho dan Yasunari, 2010, hlm. 46).

Pendapat Samho memperkuat apa yang dikatakan oleh Tilaar (1995, hlm. 507; Syarifudin, 2015, hlm. 36) bahwa pemikiran dan ajaran Ki Hadjar Dewantara kini nyaris menjadi slogan-slogan tanpa arti, tenggelam dalam teori-teori asing, termasuk pengenalan mengenai teori-teori pendidikan. Penguasaan teori-teori asing tentu perlu, tetapi tidak mengesampingkan pendidikan nasional yang mengandung kebijakan-kebijakan pendidikan sangat dalam yang lahir dari budaya bangsa Indonesia. Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara nyaris tidak diajarkan atau dikaji dan dikembangkan apalagi diterapkan di dalam praktik pendidikan nasional. Begitu juga arus globalisasi saat ini telah membatasi fungsi dan hakikat manusia sebagai makhluk hidup dunia (Susilo, 2018)

Pendidik berkewajiban mengajar dan mendidik. Mengajar berarti pendidik memberi ilmu pengetahuan, menuntun pemikiran serta melatih kecakapan anak didik (peserta didik) agar nantinya menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Mendidik berarti menuntun tumbuh kembangnya budi pekerti dalam hidup peserta didik agar nantinya menjadi manusia yang berkepribadian beradab dan susila.

Menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara, guru atau pamong dalam melaksanakan tugasnya, mengajar dan mendidik haruslah memberi tuntunan dan menyokong pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan sendiri. Pamong yang melakukan pengajaran dan pendidikan dengan menggunakan alat perintah, paksaan dengan hukuman seperti yang dipakai dalam pendidikan di masa dahulu hendaknya dihindari (Soeratman, 1985, hlm. 79).

Sistem *among* menurut Ki Hadjar Dewantara (1997, hlm. 94) berfungsi menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Tut Wuri Handayani sebagai sistem *among* mampu dijadikan landasan dan asas bimbingan dan konseling. Hal ini karena salah satu dasar yang digunakan dalam sistem *among*, yaitu kemerdekaan, secara pedagogis merupakan syarat untuk membantu perkembangan segala potensi anak didik tanpa tekanan dan hambatan. Dengan demikian akan memungkinkan perkembangan pribadi yang kuat pada anak didik.

Anak didik dengan bawaan kodratnya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi (Suparlan, 2015).

Konsep pendidikan nasional sesungguhnya telah memiliki konsep yang tepat dengan budaya Indonesia. Konsep pendidikan dibangun berdasar sendi-sendi kebudayaan Indonesia. Tut Wuri Handayani merupakan konsep yang dibangun dimana keterlibatan pendidik dan pendidikan berorientasi pada kemerdekaan dan kodrat alam siswa dalam belajarnya. Tut wuri artinya mengikuti, bermakna mengikuti perkembangan anak didik dengan prnuh berdasarkan raasa cinta kasih tanpa pamrih, tanpa ingin menguasai dan memaksa. Handayani artinya mempengaruhi, bermakna merangsang, memupuk, membimbing, menggairahkan dan memberi teladan agar anak didik mengembangkan pribadinya melalui disiplin pribadi (swa disiplin). Handayani yang berarti juga pemberian dorongan, bimbingan, semangat, motivasi, moral, kebebasan kepada siswa. Menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara, guru atau pamong dalam melaksanakan tugasnya, mengajar dan mendidik haruslah memberi tuntunan dan menyokong pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan sendiri. Cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan alat perintah, paksaan dengan hukuman seperti yang dipakai dalam pendidikan di masa dahulu hendaknya dihindari (Soeratman, 1985).

Guru sebagai pendidik yang mengajar dan mendidik di sekolah, diharapkan melaksanakan tugas mendidik dengan hati dalam rangka membentuk sikap positif peserta didik. Guru dilatih untuk mendesain sendiri rancangan pembelajarannya sehingga apa yang terpikir secara baik oleh guru dapat segera diajarkan dan dilatihkan kepada siswa agar siswa memiliki dasar-dasar sikap positif untuk melanjutkan pendidikannya. Seorang guru, pendidik, pemimpin, atau pamong, berkewajiban untuk mengajar dan mendidik. Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Soeratman (1985, hlm. 77), mengajar berarti memberi ilmu pengetahuan, menuntun gerak pikiran serta melatih kecakapan kepandaian anak didik kita agar kelak menjadi orang yang pandai. Mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak didik, supaya kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab dan bersusila. Keluhuran budi manusia itu menunjukkan sifat batin manusia misalnya kesadaran tentang kesucian, kemerdekaan keadilan, ke-Tuhan-an, cinta

kasih, kesetiaan, kesenian, ketertiban, kedamaian, kesosialan dan sebagainya, sedang kesusilaan atau kehalusan itu menunjukkan sifat hidup lahir manusia yang serba halus dan indah.

Pendidik (guru) melakukan kegiatan cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan “metode Among” dengan semboyan Tut Wuri Handayani artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Mengemong (anak) berarti membimbing, memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya. Guru atau pamong mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, bertugas mengamati dengan segala perhatian, pertolongan diberikan apabila dipandang perlu. Anak didik dibiasakan bergantung pada disiplin kebatinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar atau perintah orang lain (Soeratman, 1985, hlm. 79). Dalam melakukan Pendidikan, pamong atau pendidik hendaknya memperhatikan : (1) kemampuan dasar anak didik; (2) setiap anak didik mempunyai potensi sesuai dengan kodratnya; (3) memberi kesempatan, dorongan kepada anak didik untuk dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya; (4) membina anak didik berdasarkan atas pengalamannya sendiri, pemahamannya sendiri dan usahanya sendiri; (5) memfasilitasi agar pembunaan mengarah kepada kemampuan anak didik untuk mengolah hasil temuannya (Sujono, 2009, hlm. 9-10).

Tut Wuri Handayani bermakna sebagai pendidik atau pamong dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti anak didik dari belakang, memberi pengaruh atau intervensi, tidak menarik menarik anak didik dari depan, membiarkan anak didik mencari jalan sendiri, namun jika anak didik melakukan kesalahan maka pendidik atau pamong membantunya untuk tidak lagi melakukan kesalahan atau Kembali kepada jalur yang seharusnya (Hamzah, 199, hlm. 90). Gagasan tut wuri handayani yang dicetuskan Hajar Dewantara melalui pendidikan di Taman Siswa sejak masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan dan sampai sekarang masih diakui.

Tut Wuri Handayani awalnya merupakan salah satu asas dari asas Taman Siswa 1922 yang terdiri dari tujuh asas, yang berbunyi : “Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan mengingat tertibnya persatuan dalam perikehidupan umum (*maatschappelijk*

saamhoorigheid)” dan dikuatkan dengan asas kedua yaitu “Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri”.

Asas Taman Siswa 1922 pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak didik mempunyai hak mengatur dirinya sendiri (*zelf-veschikkingsrecht*) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan juga hak kemerdekaan orang lain serta norma-norma yang ada sehingga dalam kehidupannya akan tercipta tertib dan damainya masyarakat.

Tut Wuri Handayani memberikan arah anak didik mengembangkan cipta, rasa dan karsa sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan juga merupakan kodrat alamnya anak didik. Pendidik atau pamong mendorong, memotivasi (mendayai), agar anak didik menemukan sendiri. Anak didik ditempatkan sebagai figur sentral dalam pendidikan dengan memberikan kemerdekaan sepenuhnya untuk berkembang. Pendidik atau pamong hanya membimbing dari belakang, mengingatkan, mengoreksi jika anak didik sekiranya mengarah kepada suatu tindakan yang membahayakan (Handayani).

Anak didik ditempatkan dalam atmosfir untuk berinisiatif, kreatif, bertanggungjawab, melatih keterampilan dan kebiasaan yang baik. Anak didik mempunyai kesempatan dalam mengambil suatu inisiatif untuk berperilaku sendiri, aktif mencari pemecahan setiap masalah yang dihadapi, menanamkan rasa tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan serta bersedia menerima segala resiko atas perbuatannya. Pendidik atau pamong berfungsi sebagai pembimbing (konselor) dan pendorong (motivator), berperilaku tegas, menanamkan pesan-pesan moral atau budi pekerti atau karakter.

Mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (humanisasi), yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan. Sesungguhnya pendidikan merupakan usaha bangsa dalam membawa manusia Indonesia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir *aktual-transenden* dari sifat alami manusia (humanis) (Dewantara, 1977). Pengembangan manusia

seutuhnya (humanisasi) menuntut pengembangan semua daya secara seimbang (proposional).

Berdasarkan pemamparan di atas, dapat dipahami menurut Ki Hadjar Dewantara pendidik terdiri dari orang tua, guru atau pemimpin, termasuk pemimpin spiritual, peran pendidik yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Ki Hadjar Dewantara membedakan antara sistem pengajaran dan pendidikan. Menurutnya pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah (kemiskinan dan kebodohan). Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin seperti otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik, mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Sistem pendidikan mampu menjadikan setiap anak didik hidup mandiri dan berani berpikir sendiri (*sapere aude*). Dalam arti luas maksud pendidikan dan pengajaran adalah memerdekakan manusia sebagai anggota dari sebuah persatuan (rakyat).

Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang bersifat dewasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup bersama. Setiap orang merdeka harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana hidup serta menyadari bahwa setiap individu juga memiliki hak yang sama seperti dirinya yang juga berhak menuntut kemerdekaannya (Dewantara, 1977).

Dalam pandangan konsep merdeka belajar yang saat ini tengah digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengacu atau mengadopsi dari konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, sebenarnya pengistilahan yang seharusnya adalah belajar merdeka atau belajar yang memerdekakan. Artinya tujuan akhir dari proses pendidikan dan pembelajaran dilakukan anak didik yaitu anak didik memiliki jiwa merdeka yaitu merdeka lahirnya, batinnya dan tenaganya atau perilakunya (hasil wawancara dengan Ki Priyo Dwiwarso).

Belajar merdeka karena anak didik yang semula belajar tergantung kepada orang tua dan guru yang namun sekarang belajar merdeka. Diharapkan sang anak didik dapat merdeka sesuai kodratnya. Anak didik yang memiliki jiwa merdeka lahirnya berarti anak didik bebas dari paksaan atau perintah orang lain. Anak didik yang berjiwa merdeka batinnya yaitu mampu berdiri sendiri atau mandiri yang merupakan sifat utama bagi tiap-tiap kemerdekaan dan anak didik yang berjiwa merdeka tenaganya atau perilaku anak didik bebas mengembangkan potensinya,

mengekspresikan dirinya sejauh tidak bertentangan atau melanggar kebebasan orang lain artinya kemerdekaan yang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, sehingga tidak terjadi konflik dan masalah yang lainnya.

Sifat lahir merupakan sifat bebas yaitu lepas dari paksaan atau perintah orang lain. Sifat batin yaitu isi dari kebebasan tersebut yaitu sifat mandiri atau berdiri sendiri yang merupakan sifat yang pokok dan syarat mutlak bagi tiap-tiap kemerdekaan.

Merdeka merupakan hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menjaga tertib dan damainya perikehidupan Bersama. Orang yang memiliki kepribadian merdeka yaitu orang yang berikir, bersikap, dan bertindak bebas bertanggungjawab dengan selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban azasinya.

Nasib baik atau buruk, Bahagia atau menderita ditentukan oleh diri kita sendiri yaitu dimulai dari cara kita berpikir. Nasib diri sendiri menjadi tanggungjawab diei sendiri dan tidak menyalahkan apapun dan siapapun.

Sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikirannya akan berpengaruh terhadap nasibnya. Apa yang ada dipikiran itulah yang akan mengkristal menjadi pribadi yang sebenar-benarnya.

Jika di dalam pikiran manusia dimasuki hal-hal yang bersifat positif, maka akan menghasilkan hal-hal yang positif pula. Sebaliknya jika dimasukkan muatan negative ke dalam pikiran, maka hal-hal negative tersebut yang akan didapatkan. (Sujono, 2009).

Ciri-ciri manusia yang memiliki kepribadian merdeka yaitu : (1) Memiliki kemampuan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian. Tidak ada ketertiban jika tidak berstandar pada kedamaian dan kedamaian tidak akan terdapat jika masih mendustai diri sendiri. Tertib berarti teratur dan dama berarti tentram dan tenang. Orang yang hidupnya tertib diwujudkan dalam cara berpikir dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain taat dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku lainnya, juga manusia harus disiplin atas kemauan atau kehendak sendiri (swa disiplin).

Ketenteraman batin dan kedamaian jiwa, kegembiraan dan kegairahan hidup sangat ditentukan oleh bagaimana sikap dalam menghadapi suatu

permasalahan. Rasa permusuhan seperti rasa kecewa, marah, dendam, sesal dan sedih, iri dan dengki serta sikap melempar tanggungjawab merupakan hasil dari cara berpikir dan perbuatan kita sebelumnya; (2) Bebas dari rasa khawatir, setiap manusia pasti memiliki masalah dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan tenang. Manusia tidak mempermasahkan atau khawatir terhadap hal kecil yang tidak begitu penting dan menghakimi segala sesuatu yang belum terjadi. Semakin luas wawasan seseorang semakin kecil menghadapi masalah karena pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya; (3) Berkepribadian mandiri, Orang yang memiliki kepribadian mandiri menerima hidup sebagaimana adanya dengan segala kesulitan dan tantangannya, mampu beradaptasi dengan macam-macam kesulitan dan tantangan, bertanggungjawab atas hidupnya sendiri dan tidak menyalahkan siapapun, mengembangkan sikap baik baik yang membaikkan bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan, memiliki pendirian arah tujuan untuk melangkah, berorientasi pada Tindakan nyata, pandai bersyukur atas nikmat Tuhan (Sujono, 2009, hlm. 3-7).

Landasan filosofis pada umumnya diakui sebagai landasan yang paling dalam dari pada teori dan praktik pendidikan. Sehingga studi dan diskusi mengenai landasan filosofis ini penting. Landasan filosofis, merupakan tempat berangkat dan kembali dari pada segala perenungan dan penelitian masalah-masalah pendidikan. (Suyitno, 2009. hlm. 97).

Landasan bimbingan dan konseling merupakan masalah yang esensi sebagai pondasi layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan bimbingan dan konseling yang kokoh akan mempengaruhi struktur bangunan di atasnya dari bimbingan dan konseling. Tut Wuri Handayani sebagai sistem *among* mampu dijadikan landasan dan asas dari bimbingan dan konseling. Hal ini karena salah satu dasar yang digunakan dalam sistem *among*, yaitu kemerdekaan, secara paedagogis merupakan syarat untuk membantu perkembangan segala potensi anak didik tanpa tekanan dan hambatan. Dengan demikian akan memungkinkan perkembangan pribadi yang kuat pada anak didik. Anak didik dengan bawaan kodratnya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi (Suparlan, 2015).

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan, sebagai upaya mengatasi masalah landasan filosofis bimbingan dan konseling, perlu memperkuat landasan filsafat bimbingan dan konseling yang kontekstual dengan kebudayaan nasional. Kajian landasan filosofis bimbingan dan konseling dalam tut wuri handayani merupakan suatu keniscayaan. Penelitian ini memandang bimbingan dan konseling sebagai teori dan praksis pendidikan dengan berpedoman pada tut wuri handayani sebagai landasan filsafahnya. Hal ini yang mendorong penulis tertarik betapa pentingnya untuk mengkaji lebih jauh tentang landasan filosofis bimbingan dan konseling yang bertitik tolak dari kearifan bangsa dengan memperhatikan budaya lokal (*local culture*) sebagai salah satu kearifan lokal, untuk memperoleh signifikansi dan relevansi bagi kepentingan pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling bagi masa depan.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian fundasional. Penelitian fundasional merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan fundasional seperti permasalahan filosofis, teoretis, politis, ekonomis, dan sebagainya. Tren penelitian fundasional bimbingan dan konseling sampa saat ini dalam 10 tahun terakhir cenderung untuk mengungkap tentang teori barat, sufi, agama dan budaya.

Penelitian ini menjawab persoalan dan kebutuhan bagi tren pengembangan kajian multikulturalisme pada ranah pendidikan yang berangkat pada telaah tut wuri handayani untuk menghadapi perubahan kehidupan global. Penelitian ini termasuk penelitian fundasional yaitu untuk menggali tut wuri handayani sebagai kearifan lokal berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah : Bagaimana landasan filsafiah bimbingan dan konseling yang terkandung dalam Tut wuri handayani ?

Fokus penelitian yang bersifat fundasional ini mengenai persoalan hakikat manusia, pandangan hidup, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam tut wuri handayani sebagai salah satu kearifan budaya lokal, sehingga menghasilkan rumusan landasan filsafiah bimbingan dan konseling di Indonesia. Pertanyaan

penelitian yang dapat dibangun berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1.2.1. Bagaimana latar belakang pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep pendidikan yang memunculkan tut wuri handayani ?
- 1.2.2. Bagaimana hakikat manusia berdasarkan falsafah tut wuri handayani ?
- 1.2.3. Bagaimana pandangan tentang kehidupan dalam tut wuri handayani ?
- 1.2.4. Apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tut wuri handayani ?
- 1.2.5. Bagaimana penerapan nilai-nilai luhur tut wuri handayani dalam bimbingan dan konseling ?
- 1.2.6. Bagaimana rumusan bimbingan dan konseling yang berlandaskan nilai-nilai luhur tut wuri handayani ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan rumusan landasan filsafiah bimbingan dan konseling yang terkandung dalam tut wuri handayani. Penelitian ini dibatasi pada hakikat manusia, pandangan hidup dan nilai-nilai kehidupan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rumusan faktual tentang :

- 1.3.1. Latar belakang pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang konsep pendidikan yang memunculkan tut wuri handayani.
- 1.3.2. Hakikat manusia berdasarkan falsafah tut wuri handayani.
- 1.3.3. Pandangan tentang kehidupan dalam tut wuri handayani.
- 1.3.4. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tut wuri handayani.
- 1.3.5. Penerapan nilai-nilai luhur tut wuri handayani dalam bimbingan dan konseling.
- 1.3.6. Rumusan bimbingan dan konseling yang berlandaskan nilai-nilai luhur tut wuri handayani

1.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.4.1. Landasan Filsafiah bimbingan dan konseling merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ontologis,

epistemologis, dan aksiologis. Kajian filosofis menghasilkan asumsi-asumsi dasar tentang hakikat dan tujuan hidup manusia, sifat-sifat dan potensi manusia untuk berkembang dan menerima pengaruh dari luar, serta nilai-nilai dan norma yang digunakan dalam mengarahkan perkembangan itu. Berarti landasan filosofis bimbingan dan konseling merupakan asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik bimbingan dan konseling, asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup, dari mana asal manusia dan ke mana perginya, siapa manusia itu dan pertanyaan sulit lainnya.

1.4.2. Tut wuri handayani adalah pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang cara mengembangkan jiwa raga anak secara bebas menuju kearah adab perikemanusiaan dengan cara memberi kebebasan kepada anak untuk melatih, mencari jalan sendiri, mengembangkan keinginan, kemampuan dan kreativitasnya kemudian pendidik atau pamong berperan memberi dorongan, kekuatan dan bimbingan, koreksi (intervensi) dimana perlu jika anak menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindarinya dengan pikiran atau tenaganya sendiri. Kebebasan pada anak didik bukanlah kebebasan yang mutlak akan tetapi kebebasan yang berada yang sesuai peraturan. Pernyataan tersebut tertuang dalam buku tentang Demokrasi dan Leiderschap. Halaman 9. Cetakan ketiga. 1964. Majelis Luhur Tamansiswa: Jogjakarta dan buku Karya Ki Hadjar Dewantara bagian 1 pendidikan pada halaman 59 tahun 1977. Majelis Luhur Tamansiswa: Jogjakarta dan dalam perkembangannya tut wuri handayani menjadi semboyan pada lambang di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0398/M/1977 tentang Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan definisi operasional yang dimaksud dengan landasan filsafiah bimbingan dan konseling dalam tut wuri handayani adalah rumusan bimbingan dan konseling yang terdapat dalam semboyan tut wuri handayani, meliputi hakikat manusia yang terkandung dalam tut wuri handayani, pandangan hidup Ki Hadjar Dewantara tentang munculnya tut wuri handayani, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tut wuri handayani.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang dasar-dasar, landasan konseptual, dan filosofis dalam tut wuri handayani yang berguna bagi pengembangan teori dan praktik bimbingan dan konseling. Penelitian ini memiliki semangat untuk membangun diskusi teoretis di kalangan akademisi ilmu pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling.

1.5.2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian berupa kajian tentang landasan filsafiah bimbingan dan konseling dalam tut wuri handayani. Temuan ini dapat berguna secara praktis untuk kepentingan bimbingan dan konseling berupa menambah khazanah dan literatur asli (*indigenous*) Indonesia terkait dengan landasan filsafiah bimbingan dan konseling di Indonesia yang bersendikan kearifan lokal (*local wisdom*) pada tut wuri handayani yang menjadi ciri khas penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan. Landasan filsafiah ini menjadi pedoman dan arah ketika terjadi proses pendidikan.